

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI
DI KALURAHAN BANGUNHARJO DAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah**



diajukan oleh:

JOKO RAHARJO

NIM: 20610052

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

PENGESAHAN

TESIS

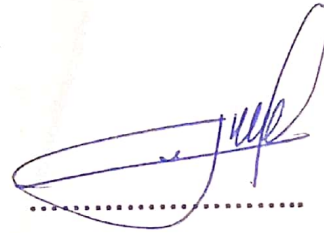
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI
DI KALURAHAN BANGUNHARJO DAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

Disusun oleh:
JOKO RAHARJO
NIM: 20610052

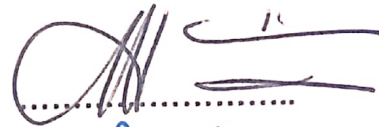
Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal 11 Agustus 2022

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)
Dr. Sugiyanto, S.Sos.,MM



Penguji I
Dr. R. Widodo Triputro



Penguji II
Dr. Tri Nugroho, E.W.



Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Mengetahui

Direktur Program Magister

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Supardal, M.Si.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JOKO RAHARJO

Nomor Mahasiswa : 20610052

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI DI KALURAHAN BANGUNHARJO DAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL ”** adalah karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan telah tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Joko Raharjo
NIM 20610052

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Peneliti ingin mempersembahkan tesis ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup:

1. Untuk “Ibu” Wiyani yang selalu memberikan doa terbaik untuk peneliti. Karya ini belum cukup untuk membalas semua kebaikanmu, karya ini sebagai bentuk tanggungjawab peneliti untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mengajarkan peneliti untuk menjadi pribadi yang sabar dan dewasa dalam menghadapi masalah. Semoga Allah SWT selalu memberikan Ibu kesehatan dan usia yang panjang.
2. Untuk “Bapak” Wagiyo Wito Utomo yang telah memberi dukungan moril maupun materi, doa dan semangat tiada henti untuk masa depan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk Bapak, meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan Bapak. Semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak kesehatan dan usia yang panjang., terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saudara yang lain.
3. Untuk “Istri” tercinta Aprilinda Kusumaningsih, S.KM yang telah memberi dukungan moril maupun materi, doa dan semangat tiada henti untuk masa depan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk Istri, meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan Istri selama kurang lebih dua tahun dalam menjalani pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan Istri kesehatan dan usia yang panjang, terima kasih juga sudah memberikan izin kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
4. Untuk “Si Kecil Sholeh” tersayang Arsenio Firas Al Farizi yang telah memberikan motivasi Hidup untuk terus membuktikan bahwa tidak mudah menggapai sebuah impian dan harapan tanpa pengorbanan. Pagi, Siang, Malam telah menemani dalam kelucuan ketika bersama dalam ruangan kecil mengerjakan tugas-tugas kuliah, tidur sampai malam

dipangkuan peneliti ketika menemani mengerjakan laporan penelitian. Karya ini peneliti persembahkan untuk Si Kecil, semoga kelak bisa menjadi hamba yang sholeh, cerdas dan selalu menjadi kebanggaan Ayah Bunda serta semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan usia yang panjang.

5. Untuk Kelima kakak-kakak tercinta terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk terus melakukan perubahan supaya bisa memberikan yang terbaik di keluarga besar.
6. Untuk Bapak dan Ibu Mertua (Sukiman dan Sutriyati, S.Pd) yang selalu memberikan doa terbaik untuk peneliti dan keluarga. Terima kasih sudah mengajarkan peneliti untuk menjadi pribadi yang sabar dan dewasa dalam menghadapi masalah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan usia yang panjang.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(Hadits Riwayat ath-Thabrani)

“Jadilah orang baik dan lebih bermanfaat tanpa harus menyakiti orang lain”

(Bapak)

“Selalu mandiri tanpa harus membebani orang lain”

(Ibu)

“Dengarkan kata hatimu, gunakan ilmumu, dan selalu berpegang teguh pada pedoman hidupmu (Al Qur’an dan Al Hadits), jika kamu menginginkan kesuksesan yang hakiki dunia akhirat”

(Joko Raharjo)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan bimbingan-Nya kepada peneliti, sehingga penyusunan tesis dengan judul “Implementasi Program Kartu Tani Di Kalurahan Bangunharjo dan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan di muka bumi.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan dan sangat berterimakasih apabila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Supardal, M.Si., selaku Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos.,MM. yang telah sabar membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan tesis.
4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro sebagai Penguji I dan Bapak Dr. EW. Tri Nugroho sebagai Penguji II yang telah menguji tesis dan membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam terselesaikannya tesis.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Magister Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan tesis ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar peneliti dalam menyelesaikan tesis.

6. Seluruh Karyawan STPMD “APMD” yang telah membantu melayani peneliti selama proses perkuliahan.
7. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat peneliti menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
8. Bapak Sumarjono selaku Dukuh Padukuhan Semail yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian yang dilakukan peneliti serta memberikan dukungan kepada peneliti.
9. Bapak Heru Prasetya selaku Dukuh Padukuhan Ngireng-Ireng yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian yang dilakukan peneliti serta memberikan dukungan kepada peneliti.
10. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada peneliti untuk proses penyelesaian tesis.

Demikian tesis ini peneliti buat, peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan peneliti lupakan.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Peneliti,

Joko Raharjo

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Konseptual.....	9
1. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2. Program Kartu Tani	13
G. Penelitian Terdahulu	25
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Objek Penelitian.....	29
3. Lokasi Penelitian.....	30
4. Teknik Pemilihan Subjek.....	30
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
a. Observasi.....	32
b. Wawancara Mendalam/ <i>In Depth Interview</i>	33
c. Dokumentasi.....	35
6. Teknik Analisis Data.....	35
a. Reduksi Data	36
b. Penyajian Data.....	36
c. Penarikan Kesimpulan.....	37

7. Teknik Keabsahan Data	37
a. Keabsahan Uji Derajat Kepercayaan.....	38
a.1. Trianggulasi Sumber	39
a.2. Trianggulasi Teknik	39
a.3. Trianggulasi Hasil	40
b. Uji Kepastian.....	41
BAB II PROFIL PADUKUHAN SEMAIL KALURAHAN BANGUNHARJO DAN PADUKUHAN NGIRENG-IRENG KALURAHAN PANGGUNHARJO KAPANEWON SEWON	42
A. Profil Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon	42
B. Profil Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon	48
BAB III HASIL PENELITIAN	55
1. Implementasi Program Kartu Tani	55
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kartu Tani.....	83
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi	23
Tabel 2. Daftar Nama Informan Padukuhan Semail.....	31
Tabel 3. Daftar Nama Informan Padukuhan Ngireng-Ireng.....	32
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Padukuhan Semail.....	44
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Padukuhan Semail.....	45
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Padukuhan Semail.....	46
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Padukuhan Ngireng-Ireng...	50
Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Padukuhan Ngireng-Ireng	51
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Padukuhan Ngireng-Ireng	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Gambar Kartu Tani	17
Gambar 2. Alur Pembuatan Kartu Tani Padukuhan Semail.....	56
Gambar 3. Alur Penebusan/Pembelian Pupuk Padukuhan Semail.....	57
Gambar 4. Alur Pembuatan Kartu Tani Padukuhan Ngireng-Ireng.....	58
Gambar 5. Alur Penebusan/Pembelian Pupuk Padukuhan Ngireng-Ireng.....	59

INTISARI

Pemerintah mempunyai peran penting terhadap kelangsungan hidup petani, oleh karena itu selain aturan baru di tahun 2022 Pemerintah sebelumnya telah mencanangkan Program Kartu Tani yang dibuat dan dikeluarkan kebijakan penggunaan kartu tani untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi yang diwajibkan bagi petani. Kebijakan hingga kini yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya berjalan lancar dan masih ada beberapa kendala dilapangan terkait penerapaaan penggunaan kartu tani. Kabupaten Bantul mulai pendataan di tahun 2017 dengan menggandeng kelompok tani yang tersebar di Desa-Desa untuk membantu dalam hal pendataan petani setempat. Penelitian ini berusaha mengkaji Bagaimana implemetasi program kartu tani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ? dan Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program kartu tani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendiskripsikan implementasi program kartu tani bagi petani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program kartu tani bagi petani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di dua lokasi berbeda. Lokasi penelitian di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul . Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive* dengan jumlah 28 narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan uji derajat kepercayaan (trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, trianggulasi hasil), dan uji kepastian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kartu tani yang ada di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo tidak berjalan dengan baik karena tidak melalui prosedur yang sesuai akantetapi berjalan dengan baik melalui teknis penebusan pupuk secara kolektif oleh kelompok tani. Sedangkan implementasi di Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih ada sebagian petani yang tidak menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Adapun faktor pendukung meliputi adanya kelompok tani yang aktif, SDM yang mumpuni baik pemerintah, perangkat desa (Dukuh) dan petani, harga pupuk yang terjangkau. Faktor penghambat meliputi kelompok tani yang tidak aktif, usia petani yang sudah lansia, jauhnya jarak tempuh kios pupuk, perubahan data petani mapun lahan garap yang tidak pasti dan tidak terdeteksi, kelangkaan pupuk NPK Ponska di akhir masa tanam ketiga, data manual dan data yang ada di aplikasi dalam kuota penebusan pupuk (SIMPI dan T-Puber) yang belum bisa tersinkronisasi.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Kartu Tani

ABSTRACT

The government has an important role in the survival of farmers, therefore in addition to the new rules in 2022, the previous government has launched the Farmer Card Program which created and issued a policy on the use of farmer cards to manage the distribution of subsidized fertilizers that are mandatory for farmers. The policies issued by the government so far have not been fully implemented and there are still some obstacles in the field related to the application of the use of farmer cards. Bantul Regency started data collection in 2017 by cooperating with farmer groups spread across villages to assist in collecting data on local farmers. This study seeks to examine how the implementation of the farmer card program in the Semail Village, Bangunharjo Village and Ngireng-Ireng Village, Panggungharjo Village, Kapanewon Sewon, Bantul Regency? and What are the supporting factors and inhibiting factors for implementing the farmer card program in Padukuhan Semail Village Bangunharjo and Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon, Bantul Regency? The purpose of this study was to describe the implementation of the farmer card program for farmers in the Semail Village, Bangunharjo Village, Kapanewon Sewon and Ngireng-Ireng Padukuhan, Panggungharjo Kapanewon Sewon Village, Bantul Regency and to determine the supporting and inhibiting factors for implementing the farmer card program for farmers in Semail Village, Bangunharjo Village, Kapanewon Sewon. and Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan

This study uses a qualitative research method with a single case study approach in two different locations. The research location was in the Semail Village, Bangunharjo Village and Ngireng-Ireng Village, Panggungharjo Village, Kapanewon Sewon District, Bantul Regency. The technique of determining the informant uses purposive method with a total of 28 sources. The data collection technique was carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction stages, data presentation and conclusion drawing. The data validity technique used a degree of confidence test (source triangulation, technical triangulation, result triangulation), and certainty testing.

The results showed that the implementation of the farmer card program in Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo did not go well because it did not go through the appropriate procedure but went well through the technical redemption of fertilizers collectively by farmer groups. While the implementation in Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo has not run optimally because there are still some farmers who do not use farmer cards in redeeming subsidized fertilizers. The supporting factors include the existence of active farmer groups, qualified human resources both government, village officials (Dukuh) and farmers, affordable fertilizer prices. The inhibiting factors include inactive farmer groups, the age of the farmers who are elderly, the distance of the fertilizer kiosk,

Keywords: Implementation, Policy, Farmer Card Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian merupakan suatu sektor pembangunan yang penting untuk diperhatikan. Pembangunan pertanian yang diproyeksikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak terlepas pada tujuan yang lainnya yaitu peningkatan produksi dan produktivitas petani. Salah satu dukungan pemerintah dalam penyediaan faktor input usaha tani adalah kemudahan akses penebusan subsidi pupuk bagi petani. Kesejahteraan petani tidak lepas dari 3 hal yaitu permasalahan pupuk, benih dan harga (Dahiri, 2018). Kecukupan pupuk bagi tanaman akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang baik sehingga produksi dan produktivitas dapat meningkat. Kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui kebijakan subsidi merupakan kebijakan pertanian yang mengalami berbagai transisi konseptual. Secara bertahap kebijakan pupuk subsidi diarahkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses pendistribusiannya. Penggunaan teknologi dan perluasan mitra dalam kebijakan kartu tani diupayakan agar dapat mengatasi permasalahan kebijakan pupuk subsidi yang selama ini terjadi.

Sektor pertanian juga merupakan sektor pembangunan yang memiliki peran strategis. Keberadaan sektor pertanian menjadi penting bagi ketersediaan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang dalam setiap waktu merupakan

hak asasi yang harus dipenuhi. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk dalam suatu wilayah menjadi sasaran utama bagi pemerintah. Indonesia sebagai negara agraris yang jumlah penduduknya sangat besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.

Pemerintah mempunyai peran penting terhadap kelangsungan hidup petani, oleh karena itu selain aturan baru di tahun 2022 pemerintah sebelumnya telah mencanangkan Program Kartu Tani yang dibuat dan dikeluarkan kebijakan penggunaan kartu tani untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi yang diwajibkan bagi petani. Kebijakan hingga kini yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya berjalan lancar dan masih ada beberapa kendala di lapangan terkait penerapan penggunaan kartu tani tersebut. Kabupaten Bantul mulai pendataan di tahun 2017 dengan menggandeng kelompok tani yang tersebar di kalurahan-kalurahan untuk membantu dalam hal pendataan petani setempat.

Kartu tani yang merupakan program pemerintah terkait layanan perbankan yang sudah terintegrasi dan memiliki fungsi untuk transaksi, simpanan, pemberian pinjaman, dan sebagai kartu subsidi pupuk (e-wallet). Kartu ini berbentuk kartu debit yang digunakan khusus oleh petani untuk membantu alokasi, distribusi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi dengan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) yang terletak pada kios atau pengecer pupuk. Pemerintah melakukan kebijakan penyediaan pupuk bagi petani

melalui subsidi harga pupuk. Kartu tani merupakan kartu elektronik yang didesain khusus untuk petani melalui kebijakan pemerintah, yang dapat berfungsi sebagai kartu debit BRI dan kartu yang dapat membaca kuota pupuk bersubsidi dan EDC BRI. Tujuan Program Kartu Tani untuk pengamanan subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi selama ini masih banyak yang belum tepat sasaran dan masih terdapat peluang untuk disalahgunakan.

Awal mula pembuatan Kartu Tani dilakukan pendataan oleh kelompok tani dilanjutkan dengan penginputan data yang nantinya akan keluar nama petani pemegang kartu tani. Diawal kebijakan yang diwajibkan menggunakan kartu tani dalam pembelian penebusan pupuk bersubsidi memberikan efek yang begitu terasa kepada petani-petani dikarenakan belum terbiasa. Yang dari dahulu pembelian pupuk langsung dibantu oleh kelompok tani sekarang berganti kebiasaan dengan menggunakan kartu tani berupa ATM dan tidak lagi di tempat kelompok tani akan tetapi di Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang sudah ditunjuk.

Masa tanam ketiga di akhir tahun 2020 barulah secara masif penggunaan kartu tani bisa diterapkan di beberapa kios penyedia pupuk bersubsidi khususnya di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Penerapan di awal masih banyak kekurangan-kekurangan yang imbasnya terasa kepada petani. Beberapa nama petani belum menerima kartu tani, penerima kartu tani tidak bisa menggunakan karena data jatah pupuk masih 0 (nol) atau tidak ada kuota pada kartu tani yang digesek, petani yang belum terdata, harga pupuk mengalami kenaikan harga , petani mengalami kesulitan dalam membeli dikarenakan jarak tempuh menuju kios (terlalu jauh) dibandingkan membeli di kelompok tani, banyak petani yang sudah

lansia sehingga tidak bisa mengikuti teknologi, kelompok tani sudah tidak mendapatkan pemasukkan kas dari pupuk bersubsidi yang dulu dikelola.

Penelitian (Wahid et al., 2020) dengan judul "Problematika Prgram Kartu Tani di wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak". Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah pelaksanaan progam kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupeten Demak sudah sesuai dengan SOP kartu tani yang dibuat oleh pembuat kebijakan, walaupun demikian permasalahan teknis dan non teknis terdapat pada setiap tahapan pelaksanaan program kartu tani. Hasil penelitian yang kedua adalah permasalahan implementasi program kartu tani dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan stuktur birokrasi yang menjadikan kompleksitas dan kesinambungan dalam permasalahan. Adapun sarat yang diberikan dalam penelitian yakni mengoptimalkan dan membuat mekanisme yang lebih mudah dan secara aplikatif dapat di laksanakan oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran. Dalam hasil penelitian tersebut sudah jelas bahwa program tani ini memang masih ada beberapa kendala yang menjadikan masalah di tingkat bawah yakni bagi petani. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan peneliti dikarenakan ada perbedaan diantaranya yaitu lokasi penelitian, objek yang diteliti, fokus penelitiannya, dan juga jenis penelitian yang digunakan.

Penelitian (Gunawan dan Pasaribu, 2020) dengan judul "Presepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi". Hasil analisis dengan menggunakan Weighted Average Index menunjukkan persepsi petani terhadap kartu tani adalah bahwa program ini tidak

tersosialisasi dengan baik dan adanya kesulitan dalam penggunaan kartu ini (kategori kuat). Disisi lain, petani juga mempunyai persepsi yang kuat bahwa kartu tani mendukung kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kemudahan proses mendapatkan pupuk. Petani mempunyai persepsi yang lemah terhadap keberhasilan penggunaan kartu tani ini, yang disebabkan karena belum diwajibkannya penggunaan kartu tani secara nasional, dan kurangnya promosi dari kios penyalur. Permasalahan implementasi kartu tani adalah: kesulitan dalam penggunaan (rumit), pemakaian kartu belum diwajibkan, kurangnya sosialisasi/penyuluhan oleh pemda, petani belum bankable, adanya tambahan biaya angkut dan kendala dalam mesin EDC. Lambatnya implementasi program kartu tani juga disebabkan karena dinas pertanian belum terlihat secara proaktif mengambil langkah-langkah operasional yang taktis dalam impementasi program kartu tani ini. Kelemahan ini perlu diatasi dengan inisiatif dukungan para pemangku kepentingan di tingkat wilayah masing-masing. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan peneliti dikarenakan ada perbedaan diantaranya yaitu lokasi penelitian, objek yang diteliti, fokus penelitiannya, dan juga jenis penelitian yang digunakan.

Permasalahan berkaitan dengan penerapan penggunaan kartu tani sebagai alat untuk melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi adalah menunjukkan bahwa sistem penerapan kebijakan yang baru oleh pemerintah belum maksimal. Penerapan tersebut bisa dilihat dengan kasus-kasus yang sudah ditunjukkan di awal sehingga mengakibatkan imbas yang tidak baik bagi petani maupun kelompok tani itu sendiri. Implementasi Kebijakan Pemerintah dan apa saja faktor-faktor yang

menjadi pendukung maupun penghambat dalam Penggunaan Program Kartu Tani bagi petani yang ada.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kawasan pertanian yang mempunyai lahan pertanian luas, hal ini menjadikan kepedulian Pemerintah Bantul untuk selalu memprioritaskan berbagai program dalam sektor pertanian yang berpihak bagi petani. Wilayah Bantul yang terdiri dari tujuh belas Kapanewon ,salah satunya Kapanewon Sewon mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, khususnya wilayah Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggunharjo. Tahun 2022 kebijakan Pemerintah Pusat terhadap anggaran dana desa yang mewajibkan seluruh Desa untuk menganggarkan kegiatan 20% bagi ketahanan pangan.

Apabila berpedoman pada Mazhab Timoho, maka fokus penelitian masuk ke dalam lingkup "Governance", dikarenakan merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang mempunyai makna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan, perubahan kondisi kaidah pengaturan, atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur. Secara umum "Governance" mengandaikan adanya pengalihan dalam proses baru pengaturan, kondisi, metode dan penyelenggaran kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah sebagai satu-satunya aktor pelaksana, akantetapi terdapat relasi kekuasaan dengan aktor selain pemerintah yang turut andil berpartisipasi, yakni dari masyarakat maupun swasta yang turut andil dalam pengelolaan publik yang dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap Kebijakan Program Kartu Tani.

B. Fokus Penelitian

Pokok masalah yang menjadi titik perhatian peneliti sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kartu Tani yang ada di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Kartu Tani yang ada di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana implementasi Program Kartu Tani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Program Kartu Tani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dirumuskan oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Kartu Tani bagi petani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Program Kartu Tani bagi petani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi bagi disiplin ilmu Pemerintahan Daerah yang mempunyai manfaat terhadap peningkatan kebijakan yang akan dibuat pemerintah sehingga memahami dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kebijakan program kartu tani sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kebijakan program kartu tani.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadikan bahan evaluasi sehingga bisa meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan yang maksimal, sehingga kebijakan

yang dibuat lebih mendukung dan berpihak bagi petani serta pembuatan kebijakan program bagi petani yang efektif dan efisien.

c. Manfaat Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Pemerintahan di STPMD "APMD", dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kartu tani.

F. Kajian Konseptual

Penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan penggunaan program kartu tani. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktek di lapangan berkaitan dengan penggunaan Program Kartu Tani dan apakah ada hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan Program Kartu Tani yang menjadi kebijakan pemerintah pusat bagi petani yang berada di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Berangkat dari hal tersebut, terdapat teori yang akan digunakan sebagai landasan teori :

1. Implementasi Kebijakan Publik

James Anderson(Solichin, 2015:8) menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah suatu *“purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi).

Menurut Nugroho dalam (Meutia, 2017:3), kebijakan publik memiliki ciri khas tertentu yakni; pertama, sesuatu yang diimplementasikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional karena mudah dipahami maknanya dan kedua, sesuatu yang ukurannya jelas yaitu bisa diukur sejauh mana perwujudan haluan yang sudah diregulasi itu dapat diimplementasikan.

Carl Friedrich (Solichin, 2015:9) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002:70).

Menurut (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991:21), Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan (Agustino, 2008:138).

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip(Solichin, 2008:65), mengatakan bahwa : Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokusperhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Bahwa dapat disimpulkan implementasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh sebuah objek berikutnya yakni kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle(Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel itu mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,

- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh : masyarakat di wilayah gunung Kidul lebih suka menerima program air bersih daripada menerima program kredit rumah,
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Komponen lingkungan kebijakan mencakup :

- a. Seberapa besar kekuasaan,
- b. Kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
- c. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,
- d. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yaitu: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik paling penting setidaknya dalam dua hal :

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental

yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar,

b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

Implementasi Kebijakan

Teori George C.Edward, Edward III (Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu :

a. Komunikasi yakni keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target Group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi,

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut

dapat terwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial,

c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.. ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif,

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau upaya tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh beberapa aspek yakni: alternatif , benar, kepuasan, kebutuhan, koordinasi, tepat waktu, hemat, pengambilan keputusan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta tanggungjawab. Implementasi kebijakan dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan publik, hal itu dilatarbelakangi agar bisa meminimalkan pemanfaatan sumber daya secara benar dan tepat(Meutia, 2017:80).

2. Program Kartu Tani

Dalam rangka mendukung pertanian Indonesia Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan Program Kartu Tani. Pada pasal 17 ayat 2 Permentan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 penggunaan kartu tani ditegaskan (PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2020 Ed.Pdf, 2020:13). Kartu Tani adalah kartu debit tabungan multi fungsi yang terintegrasi dengan SIMPI(Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia). Kartu Tani tersebut dapat digunakan petani untuk transaksi jasa keuangan secara umum dan dapat juga dimanfaatkan untuk pembelian pupuk subsidi. Terlebih dari itu kartu tani juga bisa untuk mengakses pendistribusian bantuan dan edukasi pemerintah, serta berbagai informasi seperti harga saprotan dan komoditi serta stok pupuk bersubsidi diberbagai wilayah.

Kementerian Pertanian yang mengagas Program Kartu Tani diharapkan dapat mengefisienkan pupuk bersubsidi dalam pendistribusiannya, dengan sasaran pemberian bantuan pupuk bersubsidi yakni petani-petani kecil sebagai tujuan akhir program kartu tani ini. Secara khusus memang kartu tani ini dirancang untuk petani-petani kecil yang dimana Pulau Jawa adalah daerah pertama yang memulai impementasi Program Kartu Tani tersebut. Dalam pengimplementasiannya ada perbankan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kartu tani dilapangan. Kartu tani yang mulai di uji coba tahun 2017-2018 ini pada pelaksanaannya bekerjasama lewat Kementerian Pertanian dan tiga bank BUMN dalam menerbitkan kartu tani yang telah dimaksudkan diatas. Tiga bank tersebut

antara lain Bank Mandiri di Jawa Barat, BNI di Jawa Timur, sedangkan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten bekerjasama dengan BRI (Gunawan & Pasaribu, 2020, p. 132).

Wujud perlindungan pemerintah kepada para petani seperti yang diwasiatkan oleh UU No 19 Tahun 2003 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan latar belakang diimplementasikannya Program Kartu Tani. Kartu tani menjadi salah satu kebijakan yang memanfaatkan teknologi sebagai upaya dalam menangani masalah-masalah tersebut, terutama dalam hal pemasokan, pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi. Sesuai dengan Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 pada pasal 13 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa “penyaluran bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani; penerapan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan memanfaatkan kartu tani dilakukan pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai uji coba.

Pada tahun 2019, pemerintah belum mewajibkan penggunaan kartu tani di seluruh Indonesia. Program Kartu Tani yang diinisiasi mulai tahun 2016, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan di Pulau Jawa diantaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2018, program ini diperluas di 10 provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehubungan dengan telah dilakukannya uji coba di

beberapa lokasi pada tahun 2017-2018, maka perlu dilakukan evaluasi terkini untuk mendapatkan tambahan informasi terkait penggunaan kartu tani(Gunawan & Pasaribu, 2020).



Gambar 1.1 Kartu Tani Berbentuk Kartu ATM

Manfaat, Tujuan dan Sasaran Kartu Tani

Keberadaan kartu tani tidak hanya menguntungkan bagi para petani, di sisi lain kartu tani juga memberikan banyak manfaat dan keuntungan pada pemerintah sendiri. Dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah kementerian pertanian. Beberapa manfaat keberadaan kartu tani bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pertanian di antaranya yaitu:

1. Lebih mudah mendata petani kartu tani ini nantinya menjadi single entry data bagi pemerintah dalam proses validasi secara berjenjang. Validasi tersebut juga semakin mudah karena data petani dalam kartu tani akan tersimpan secara online pada tingkat nasional.

2. Dana subsidi manfaat berikutnya bagi pemerintah dengan adanya kartu tani adalah membantu proses transparansi dalam pemberian dana subsidi pertanian oleh kementerian keuangan. Transparansi ini merupakan kunci yang paling penting agar bantuan dana subsidi dapat diterima kesasaran dengan tepat. Selain itu juga menghindari adanya penyelewengan dana dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab sehingga kesejahteraan petani menjadi terganggu.

3. Program bantuan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan baik, Pupuk merupakan komponen yang paling penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya. Kartu tani bisa digunakan bagi para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di kios-kios yang ditentukan kementerian pertanian. Kartu tani yang dimiliki oleh para petani berisikan kuota pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan tersebut tergantung luas lahan yang dimiliki para petani.

4. Memperoyeksikan potensi panen kartu tani juga bisa digunakan oleh pemerintah dalam memproyeksikan potensi panen di wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan dalam kartu tani semua data komoditas pertanian dapat dipantau, baik itu berupa nilai jual panen dan sebagainya melalui data yang dimiliki oleh BULOG sebagai off taker. Pemerintah pun bisa menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan pada daerah yang berpotensi gagal panen di kemudian hari.

5. Peran serta stakeholder lainnya Peranan para pemerintah daerah sangat menentukan kesuksesan program kartu tani tersebut. Khususnya dinas pertanian yang di kabupaten dan kota. Stakeholder lainnya yang memiliki andil besar dalam pelaksanaan program kartu tani Abulog. Disini BULOG bertindak sebagai off taker penjualan hasil panen petani secara langsung. Dengan begitu, para petani dapat menikmati keuntungan hasil panen secara menyeluruh.

Tujuan yang ingin dicapai dengan diterapkan kartu tani adalah terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis,waktu, tempat, mutu dan harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, maksud azas 6 (enam) tepat itu adalah:

- 1) Tepat Tempat : tempat dimana pupuk itu diberi
- 2) Tepat Jenis : jenis pupuk yang diberikan sesuai kebutuhan petani
- 3) Tepat Harga : harga sesuai HET atau tidak untuk petani
- 4) Tepat Mutu : pupuk yang diberikan sesuai atau tidak untuk petani
- 5) Tepat Jumlah : jumlah pupuk sesuai atau tidak dengan kebutuhan dan luas lahan petani (lahan dibawah 2 hektar)
- 6) Tepat Waktu : waktu pemberian pupuk sesuai kebutuhan petani 1 (satu) bulan sebelum musim panen.

Kartu Tani E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dapat diatasi Aplikasi E-RDKK melalui Kartu Tani yang dibagikan kepada masing-masing petani digunakan

sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi. Aplikasi E-RDKK diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani penerima pupuk bersubsidi.

E-RDKK adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani. Aplikasi E-RDKK digunakan untuk melakukan input data dan menyimpan database petani yang berisi diantaranya data yang terdapat di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), identitas pribadi dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani di pengecer yang telah ditentukan oleh pemerintah. Aplikasi E-RDKK membutuhkan data usulan RDKK masing-masing kelompok tani dan data alokasi pupuk bersubsidi, serta administrator user yang memiliki akses untuk mengelola (membuat/mengubah/menghapus) seluruh user yang ada dalam aplikasi ERDKK.

Pupuk Bersubsidi

Program subsidi pupuk bagi petani adalah program nasional yang bertujuan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk sesuai kebutuhannya dalam kegiatan usaha tani dengan harga terjangkau agar dapat meningkatkan produksi pertanian dan menambah pendapatan serta memperbaiki kesejahteraannya.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA,

Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan pupuk bersubsidi adalah pupuk dalam pengadaannya mendapatkan potongan biaya dari pemerintah dengan mekanisme pengawasan tertentu yang ditujukan bagi petani di sektor pertanian yang terdiri atas jenis pupuk Urea, SP-36,ZA, NPK dan pupuk organik. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Pasal 3 ayat 3.

Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Urea;
- b. SP-36
- c. ZA; dan
- d. NPK
- e. Pupuk Organik

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menurut (Sudjono, 2011:23), sistem distribusi dapat diartikan sebagai rangkaian mata rantai penghubung antara produsen dengan konsumen dalam rangka menyalurkan produk atau jasa agar sampai ke tangan konsumen secara efisien dan mudah dijangkau. Menurut (Sudjono, 2011:24), distribusi pupuk bersubsidi pada awalnya menggunakan suatu sistem yang dikendalikan melalui campur tangan pemerintah secara langsung (*fully regulated*).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pelaksana Subsidi Pupuk ditugaskan pada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawab masing-masing. Pengaturan pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk berasubsidi antar produsen dilakukan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih efisien, efektif dan fleksibel.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada lini III dilakukan melalui produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya pada penyalur lini IV dilakukan oleh distributor kemudian menyalurkan kepada Pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Untuk petani/kelompok tani, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui Kartu Tani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). HET pupuk bersubsidi dimuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1 HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Pupuk

Jenis Pupuk	Per kg/Liter	Per Zak / Botol
Urea	2.250	112.500
Za	1.700	85.000
SP-36	2.400	120.000
NPK PHIONSKA	2.300	115.000
PETROGANIK	800	32.000
*NPK FORMULA KHUSUS	3.300	165.000
*PHONSKA OCA	20.000	20.000

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tanggal 20 Desember 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Petani

Tani dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Sedangkan program dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Istilah "petani" dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani mempunyai banyak dimensi, sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. (Moore,1966:243) dalam bukunya *Social Origins of Dictatorship and Democracy and Peasant in the Making of the Modern World* mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi legal, kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah. Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Wolf sebagaimana dikutip (Teodor Shanin,1985:49) memberikan istilah peasant untuk petani yang bercirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat

dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruangan-ruangan tertutup (greenhouse) di tengah kota atau di dalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga di daerah-daerah pinggiran kota. Pekerjaan pokok yang dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka adalah di bidang pertanian. Umumnya pekerjaan petani terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan lahan.

Ciri-ciri masyarakat petani sebagai berikut(Sajogyo, 1999):

- 1) satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda,
- 2) petani hidup dari usahatani, dengan mengolah tanah (lahan),
- 3) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas, dan
- 4) petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah 'orang kecil' terhadap masyarakat di atas-desa

Adapun "petani kecil" dengan ciri-ciri sebagai berikut(Arie Sujito,2013:32):

- 1) berusahatani dalam tekanan penduduk lokal yang meningkat,
- 2) mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah,
- 3) bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten, dan
- 4) kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya.

Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara individu yang dapat dilihat dari perilaku yang nampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

G. Penelitian Terdahulu

Dikarenakan penelitian tentang Kebijakan Program Kartu tani ini sudah pasti ada dilakukan oleh berbagai kalangan baik dari kalangan akademis maupun kalangan praktis bidang pertanian, maka untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Disini penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Penelitian (Ahmad & Wibowo, 2021) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember pada tahun 2021 dengan judul " Dampak Kebijakan kartu Tani terhadap Produksi dan Efisiensi Usaha Tani Padi di Kabupaten Jember". Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif dengan analisis data menggunakan analisis fungsi produksi dan efisiensi stocastic frontier dan analisis perbandingan dengan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan variabel luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk urea, jumlah pupuk ZA, jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi. dan hasil lainnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan produktivitas petani penerima dan nonpenerima kartu tani. Usaha padi penerima kartu tani dan bukan penerima kartu

tani dapat dikatakan efisien secara teknis karena berada diatas nilai 0,70 yang artinya bahwa Kartu Tani belum menunjukkan produktivitas dan efisiensi yang lebih baik dari petani non kartu tani. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi penggunaan dan manfaat dari kartu tani kepada petani di Kabupaten Jember.

Kedua, Penelitian (Wahid et al., 2020) pada tahun 2020 dengan judul "Problematika Prgram Kartu Tani di wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak". Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis eksplantori. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah pelaksanaan progam kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupeten Demak sudah sesuai dengan SOP kartu tanu yang dibuat oleh pembuat kebijakan, walaupun demikian permasalahan teknis dan non teknis terdapat pada setiap tahapan pelaksanaan program kartu tani. Hasil penelitian yang kedua adalah permasalahan implementasu program kartu tanu dipengaruhi oleh faktor omunikasi, sumberdaya, disposisi dan stuktur birokrasi yang menjadikan kompleksitas dan kesinambungan dalam permasalahan. Adapun sarab yang diberikan dalam penelitian yakni mengoptimalkan dan membuat mekanisme yang lebih mudah dan secara aplikatif dapat di laksanakan oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran.

Ketiga, Penelitian (Chakim et al., 2019) Program Studi Manajemen dan Bisnis Sekolah Bisnis IPB pada tahun 2019 dengan judul "Pengaruh Implemtasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal Jawa Tengah". Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa implementasi kartu tani berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Dan adapun faktor yang signifikan dapat mempengaruhi implementasi kartu tani adalah faktor pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, faktor sosial budaya dan faktor kondisi ekonomi petani.

Keempat, Penelitian (E. Gunawan & Pasaribu, 2020) dengan judul “Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi”. Hasil analisis dengan menggunakan Weighted Average Index (WAI) menunjukkan faktor kuat persepsi petani terhadap kartu tani adalah bahwa program ini tidak tersosialisasi dengan baik dan adanya kesulitan dalam penggunaan kartu ini. Petani juga memberikan persepsi yang kuat terhadap adanya kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi dengan adanya kartu tani ini. Di sisi lain, petani mempunyai persepsi yang lemah terhadap penggunaan kartu tani ini. Hal ini dikarenakan petani tidak diwajibkan menggunakan kartu tani ini, dan kurangnya promosi dari kios penyalur dalam penggunaan kartu tani. Masalah utama dalam implementasi kartu tani adalah kurangnya kesadaran petani untuk menggunakan kartu tani, kesulitan dalam penggunaan, dan tidak diwajibkan oleh pemerintah daerah (pemda). Agar program kartu tani berhasil, disarankan agar program ini dijadikan sebagai program nasional, lebih ditingkatkannya kerjasama dan kesamaan pandangan di antara para pihak, tersediaannya jaringan infrastruktur komunikasi, dan sosialisasi yang menyeluruh dan terencana.

Penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu dikarenakan penelitian ini menggunakan metode

studi kasus tunggal dengan satu isu yang dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi Program Kartu Tani dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan Program Kartu Tani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009:4). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *case study* atau studi kasus. Studi kasus yang dirumuskan oleh Robert K. Yin, merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur *how* dan *why*, pada pertanyaan utama penelitiannya meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata. Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, kelompok, organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, untuk diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian yang terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu. Studi kasus adalah suatu inquiri empiris yang mengidentifikasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2008:18). Sebagaimana batasbatas antar fenomena dan konteks yang tak tampak dengan

tegas, serta multi sumber bukti yang dimanfaatkan. Sebagai suatu inquiri studi kasus tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak pula harus tergantung pada data etnografi atau observasi partisipan.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena diharapkan penelitian ini dapat mengungkap, menguraikan dan menjelaskan serta bisa membandingkan pemaknaan-pemaknaan dalam melihat fenomena yang terjadi pada objek penelitian tentang implemetasi penerapan program kartu tani dan faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat Program Kartu Tani pada satu isu dan di dua Padukuhan yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pelaksanaan Program Kartu Tani dan menganalisis permasalahan implementasi Program Kartu Tani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti perlu melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan yang diteliti. Jangan sampai pembuatan rancangan penelitian dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian(Sugiyono, 2009:41). Adapun obyek penelitian ini yaitu tentang implemetasi dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat penerapan

kebijakan program kartu tani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menemukan fenomena tertentu disana dan ditetapkan sebagai suatu latar untuk diteliti. Dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk data yang bersifat sementara. Nantinya data tersebut akan disandingkan serta dikonfirmasi dengan data yang ditemukan saat peneliti telah terjun ke lapangan (lokasi penelitian). Dapat dipastikan terlebih dahulu dalam menentukan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga (Moleong, 2009:127). Penelitian ini mengambil lokasi di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pemilihan Subjek (Sumber Data)

Sumber data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan dari hasil wawancara terhadap informan. Penentuan sumber data dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010:299-300).

Dengan metode *purposive* diharapkan agar informan yang dipilih merupakan informan yang kompatibel dalam memberikan informasi terkait tema penelitian. Penentuan informan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh

penelitian ini. Informan yang dipilih adalah komponen yang dapat memberikan informasi, mempresentasikan fenomena, aktivitas individu dan kelompok, serta karakteristik dalam kemajemukan objek penelitian. Untuk menentukan informan, peneliti ini mengambil informasi berdasarkan pertimbangan yang khusus sehingga layak untuk dijadikan informan (Noor, 2011). Subyek atau sumber data dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.2. Data Informan Padukuhan Semail

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Rubinem,S.P	Perempuan	PPL
2	Ngudi Raharjo	Laki-Laki	KPL
3	Nurbiantoro,S.P	Laki-Laki	Admin E-RDKK
4	Sumarjono	Laki-Laki	Pamong Kalurahan (Dukuh)
5	Kasihono	Laki-Laki	Ketua Kelompok
6	Widodo	Laki-Laki	Sekretaris Kelompok Tani
7	Waridin	Laki-Laki	Petani
8	Kasdiyono	Laki-Laki	Petani
9	Ali Wintoko	Laki-Laki	Petani
10	Suparjo	Laki-Laki	Petani
11	Giyono	Laki-Laki	Petani
12	Suryono	Laki-Laki	Petani
13	Mulyadi	Laki-Laki	Petani
14	Mintarno	Laki-Laki	Petani

Sumber : Data Primer 2022

Tabel 1.3. Data Informan Padukuhan Ngireng-Ireng

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Nurbiantoro,S.P	Laki-Laki	PPL
2	Watik	Laki-Laki	KPL
3	Nurbiantoro,S.P	Laki-Laki	Admin E-RDKK
4	Heru Prasetya	Laki-Laki	Pamong Kalurahan (Dukuh)
5	Marsono	Laki-Laki	Petani
6	Warsono Hajam	Laki-Laki	Petani
7	Wardoyo	Laki-Laki	Petani
8	Dahono	Laki-Laki	Petani
9	Nrimo Rejo	Laki-Laki	Petani
10	Bunardi	Laki-Laki	Petani
11	Sajiyo	Laki-Laki	Petani
12	Lunggi Santoso	Laki-Laki	Petani
13	Rubiyo	Laki-Laki	Petani
14	Wardi Utomo	Laki-Laki	Petani

Sumber : Data Primer 2022

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk kepentingan penelitian. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan langkah atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera(Arikunto, 1989:199). Dalam metode ini peneliti mengamati secara langsung kemudian

merekam dalam bentuk catatan-catatan segala kegiatan, perilaku, fenomena-fenomena yang sebenarnya. Dalam hal ini mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk memahami implementasi dan pendukung maupun penghambat dari program kartu tani yang ada. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi selama kurang lebih empat (4) bulan dimulai pada bulan Februari 2022 sampai bulan Juni 2022. Tempat Observasi dilakukan di Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Sewon, Kios Pupuk Lengkap (KPL) Sarana Tani Kalurahan Bangunharjo, Kios Pupuk Lengkap (KPL) Arto Moro Kalurahan Timbulharjo , Kelompok Tani Handayani Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Petani yang ada di Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon. Adapun tujuan observasi supaya dapat mengamati dan memahami pelaksanaan program kartu tani dan faktor pendukung maupun penghambat penerapan kebijakan program kartu tani pada petani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo dan Petani Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*)(Sugiyono, 2010:72).

Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka. Wawancara ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik informan yang dihadapi (Mulyana, 2004:180-181).

Wawancara mendalam sering digunakan untuk mengungkapkan pengalaman hidup (*life experience*) subjek penelitian yang menekankan konstruksi simbolik dan kontekstual identitas subjek penelitian (Mulyana, 2004:187). Wawancara mendalam sangat penting dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan sehingga dapat diketahui alasan yang sebenarnya dari mana nara sumber dalam mengambil keputusan untuk bertindak

Adapun informan yang diwawancarai, yaitu pengurus Kelompok Tani Handayani dan petani di Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo, Petani Padukuhan Ngireng-Ireng, Petugas Kios Pupuk Lengkap (KPL) Sarana Tani Kalurahan Bangunharjo, Petugas Admin E-RDKK, Koordinator Pendamping Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kalurahan Bangunharjo, Pendamping Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kalurahan Bangunharjo, Pendamping Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain(Sugiyono, 2010:82).

Dokumen-dokumen yang sudah ada berupa buku daftar petani yang masuk di dalam daftar E-RDCK per Padukuhan yang ada di masing-masing buku E-RDCK Kalurahan, Daftar nama-nama Petani dari petugas admin BPP Kapanewon Sewon, Kartu Tani. Dokumen E-RDCK diperoleh pada bulan Mei 2022 sedangkan soft file daftar petani diperoleh bulan Juni 2022.

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, tindakan yang akan dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data merupakan tahapan yang penting dan menentukan dalam penelitian. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang mana peneliti berupaya menggambarkan serta menjelaskan kembali data-data yang telah diperoleh menggunakan kata-kata.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

dapat dikelola, mensistensinya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Imam Gunawan mengemukakan bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (Gunawan, 2013:210):

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang direduksi merupakan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk mengemukakan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari pola dan makna yang tersembunyi di balik pola dan data yang nampak. Dalam mereduksi data yang ada peneliti mengelompokkan beberapa petani yang hasil wawancara (*interview*) mempunyai kesamaan dalam memberikan informasi terkait implementasi Program Kartu Tani.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dalam analisis ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan didapat berdasarkan hasil analisis data baik berasal dari catatan lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan analisis induktif. Maksudnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan berangkat ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena kemudian merumuskan teori. Setelah tahap penelitian sudah selesai dilakukan, kemudian perlahan hasil penelitian tersebut dikumpulkan lalu diubah dalam bentuk tulisan.

3. Teknik Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data peneliti akan melakukan keabsahan data supaya penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang benar. Kebenaran data dan kesimpulan yang benar mampu mewujudkan produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika.

Dalam upaya menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data serta pelaksanaan teknik pemeriksaan, ada empat yaitu : 1. Keabsahan uji derajat kepercayaan (*credibility*), 2. Uji keteralihan (*transferability*), 3. Uji kebergantungan, 4. Uji kepastian. Peneliti menggunakan dua teknik keabsahan data sebagai berikut (Sugiyanto, 2021:35) :

a. Keabsahan Uji Derajat Kepercayaan

Derajat kepercayaan fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Positifnya peneliti tidak dianggap sebagai orang yang mengganggu karena sudah terbentuk rapor “*mutual trust*” sehingga kehadiran peneliti dibutuhkan. Secara kebetulan peneliti sering berkomunikasi dan berinteraksi ketika ada pertemuan Gapoktan Tani Bangunharjo juga sebagai Perangkat Desa (Dukuh) serta sebagai pelaku tani (petani) sehingga kehadiran peneliti diterima dengan baik dan sudah terbangun hubungan *mutual trust*. *Credibility* dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya: a) perpanjangan pengamatan, dilakukan ketika data kurang lengkap maka peneliti datang kembali ke BPP Kapanewon Sewon maupun ke Padukuhan Semail dan Ngireng-Ireng secara berulang-ulang sampai data penelitian diyakini sudah kredibel. b) meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pada tahap ini peneliti membaca ulang dan mengecek ulang urutan peristiwa agar berkesinambungan dalam menyusun deskripsi data akan lebih akurat. c) diskusi dengan teman sejawat, pada bagian ini peneliti berdiskusi untuk meminta masukan kepada teman sesama Dukuh: Bapak Sumaryadi (Dukuh Padukuhan Wojo Kalurahan Bangunharjo) yang kebetulan juga sebagai pelaku tani (petani) yang mempunyai kartu tani, d) analisis kasus negatif, peneliti berdiskusi dengan salah satu petani milenial Kalurahan Timbulharjo Bapak Subiantoro tentang informasi

negatif penyalahgunaan kartu tani, dan e) triangulasi, untuk triangulasi peneliti telah melakukan beberapa jenis.

Triangulasi merupakan bagian dari uji kredibilitas, dalam pengujian kredibilitas ini dijadikan alat sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Uji kredibilitas data merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang, peneliti partisipan, atau pembaca (Sugiyanto, 2021:35). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai uji kredibilitas. Berhubungan dengan hal tersebut, triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dalam penelitian ini dibagi menjadi empat sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyanto, 2021:36). Triangulasi sumber pada penelitian yang dilakukan di kelompok Tani Handayani Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon dilakukan kepada empat belas orang yang berasal dari lima unsur PPL, Admin E-RDCK, KPL, pengurus kelompok tani dan petani, di Padukuhan Ngireng-Ireng kepada empat belas orang dari empat unsur PPL, admin E-RDCK, petani.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini menggunakan teknik wawancara, observasi secara terus-menerus

, dan dokumentasi penelitian agar data yang diperoleh semakin valid (Sugiyanto, 2021:36). Peneliti dalam melakukan triangulasi teknik ini dengan cara mencocokkan data dari hasil obeservasi dengan hasil wawancara apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Ketika dalam melakukan wawancara di dalam penelitian ini peneliti terkadang masih belum mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga di akhir wawancara peneliti akan menanyakan kembali pertanyaan yang belum terjawab dengan lebih mengerucutkan ke pokok permasalahan yang diteliti.

3. Triangulasi Hasil

Triangulasi hasil atau temuan merupakan proses konfirmabilitas, dimaksudkan agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi hasil atau lebih sering disebut konformabilitas yang artinya melaporkan temuan penelitian kepada informan yang di wawancarai (Sugiyanto, 2021:39). Triangulasi temuan disampaikan dan didiskusikan kepada BPP Kapanewon Sewon dengan alasan memiliki wewenang dalam birokrasi Pemerintahan sebagai mitra petani untuk memberikan evaluasi, meluruskan dan memberi masukan. Dalam penelitian ini triangulasi hasil disampaikan kepada Ibu Rubinem,S.P selaku koordinator PPL di BPP Kapanewon Sewon, dan hasilnya dapat menerima dan memahami yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan kartu tani di Padukuhan Semail dan Padukuhan Ngireng-Ireng. Di samping itu, peneliti memberikan masukan:

Padukuhan Semail : Pembuatan Surat Kuasa penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani sesuai arahan dari BPP Kapanewon Sewon dikarenakan belum

dibuat oleh pengurus Kelompok Tani Handayani supaya pengurus punya bukti kuat dalam melakukan transaksi di KPL walaupun sudah ada catatan di notulensi rapat.

Padukuhan Ngireng-Ireng : Kelompok Tani yang ada diusahakan kembali aktif dan juga BPP Kapanewon Sewon harus selalu memberikan motivasi dan arahan supaya kelompok tani kembali aktif dan berkembang dalam usaha pertanian sehingga petani merasa diperhatikan.

b. Uji Kepastian

Conformability merupakan objektivitas bahwa hasil penelitian disepakati untuk diterima, hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji objektivitas kriteria kepastian atau objektivitas terpusat pada data, bukan pada orang atau banyaknya orang. Menguji hasil penelitian dengan proses yang dilakukan apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian telah terpenuhi standar *conformability*-nya (Sugiyanto, 2021:40). Proses penulisan tesis ini telah melalui beberapa kali revisi sesuai dengan hasil konsultasi dengan pembimbing. Dalam Uji Kepastian ini juga menjelaskan bahwa temuan penelitian ini sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul” yang diterbitkan oleh Program Magister STPMD “APMD” dengan alamat website <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/about/editorialTeam> terbit pada 25 Juni 2022.

BAB II

PROFIL PADUKUHAN SEMAIL KALURAHAN BANGUNHARJO

KAPANEWON SEWON DAN PADUKUHAN NGIRENG-IRENG

KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL

Pada Bab ini akan menyajikan gambaran secara umum tentang beberapa bagian. Bagian A merupakan profil Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon dan Bagian B merupakan profil Padukuhan Ngireng-Ireng Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon.

A. Profil Padukuhan Semail Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

1. Orientasi dan Batas Wilayah

Padukuhan Semail terletak di Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55188 yang terdiri dari 7 RT dengan luas wilayah 42,78 Ha dan jumlah penduduk 1634 orang dalam 482 KK. Padukuhan Semail termasuk blok tengah dari Kalurahan Bangunharjo yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Padukuhan Ngoto
- Selatan : Padukuhan Mredo
- Barat : Padukuhan Jurug
- Timur : Padukuhan Ngoto

2. Kondisi wilayah

Padukuhan Semail secara geografis adalah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 78 meter dari permukaan laut. Ada satu jalan propinsi yang melewati Padukuhan Semail yaitu Jalan Imogiri Barat. Luas wilayah Padukuhan Semail adalah 42,78 Ha dengan luas permukiman 12,089 Ha,tegal pekarangan 10 Ha dan luas sawah pertanian 20,691 Ha.

3. Orbitasi

Jarak Padukuhan Semail ke :

- Kantor Kalurahan Bangunharjo : 500 m
- Ibu Kota Kapanewon Sewon : 1 Km
- Ibu Kota Kabupaten Bantul : 4 Km
- Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta : 9 Km

4. Data Demografi

Padukuhan Semail memiliki data kependudukan memiliki jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuannya. Berikut ini data Demografi sederhana Padukuhan Semail:

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rukun Tetangga (RT)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	129	219	348
2	143	182	325
3	152	159	311
4	90	93	183
5	105	104	209
6	99	89	188
7	39	31	70
Jumlah	757	877	1634

Sumber : Data Padukuhan Semail, November 2021

Jumlah Penduduk :

Laki-laki : 757 orang (46,33%)

Perempuan : 877 orang (53,67%)

Jumlah : 1634 orang dari 482 KK

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah penduduk laki-laki di Padukuhan Ngireng ireng sebesar 46,33%, lebih besar daripada penduduk perempuan yang berjumlah 53,67%. Berada di kawasan pinggiran kota, jumlah penduduk bisa menjadi modal dasar pembangunan sebagai sumberdaya manusia yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis mata pencahariannya.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak/ belum sekolah	639	39,11%
2.	SD	279	17,07%
3.	SMP	293	17,93%
4.	SMA	257	15,73%
5.	Perguruan Tinggi	166	10,16%
	Jumlah	1.634	100%

Sumber : Data Padukuhan Semail, November 2021

Berdasarkan Tabel 2.2, sebagai sebuah padukuhan, tingkat pendidikan penduduk Padukuhan Semail relatif tinggi, karena mulai dari lulusan SD hingga perguruan tinggi jika dijumlah ada 60,89%. Apabila ditinjau dari wajib belajar 12 tahun juga sudah relatif tinggi dengan jumlah prosentase 50,73% penduduk. Hal ini bisa menjadi salah satu modal sumber daya manusia dalam membangun padukuhan khususnya dan Kalurahan pada umumnya. Penduduk yang lulus hingga perguruan tinggi diharapkan bisa meningkat dengan kesadaran masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	97	12,56%
2.	Buruh	186	24,09%
3.	Pedagang	39	5,05%
4.	PNS	28	3,63%
5.	Karyawan swasta	180	23,32%
6.	Industri rumah tangga	8	1,04%
7.	Lain-lain	234	30,31%
	Jumlah	772	100%

Sumber : Data Padukuhan Semail, November 2021

Berdasarkan Tabel 2.3, penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani relatif lebih sedikit yaitu sebesar 12,56% .Setelah itu penduduk yang bekerja sebagai buruh ada sebesar 24,09%. Penduduk yang bekerja sebagai pedagang relatif kecil yakni hanya sebesar 5,05 %, bahkan yang bergerak di bidang industri rumah tangga hanya sejumlah 8 orang (1.04 %)

5. Potensi Padukuhan Semail

Potensi padukuhan merupakan kekuatan yang dimiliki padukuhan dapat berupa SDA, SDM, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya dan sumber daya politik yang memungkinkan dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan. Padukuhan Semail memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik potensi fisik maupun non fisik. Potensi-potensi tersebut dapat

dikembangkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Padukuhan Semail. Potensi-potensi yang ada di Padukuhan Semail antara lain berupa potensi alam, potensi ekonomi, potensi sosial budaya dan potensi kelembagaan.

a. Potensi Alam

Merupakan potensi fisik dasar yang dimiliki Padukuhan Semail yakni kondisi tanah yang subur. Tanah yang subur di Padukuhan Semail digunakan sebagai lahan pertanian, namun dari tahun ke tahun jumlah arealnya semakin berkurang karena terdesak untuk pemukiman.

b. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi merupakan potensi yang dimiliki penduduk padukuhan dari hasil sektor mata pencaharian. Potensi ekonomi yang ada di Padukuhan Semail dapat terlihat dari bermacam-macamnya mata pencaharian warganya. Diantaranya adalah pekerja bangunan, pertanian, kerajinan tangan rumahan (UMKM).

c. Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya yang terdapat di Padukuhan Semail yaitu adanya paguyuban ketoptrak yang setiap tahun mengadakan pagelaran.

d. Potensi Kelembagaan

Tersalurnya aspirasi dan potensi berorganisasi warga masyarakat di Padukuhan Semail melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) baik lembaga-lembaga ini berada tingkat kalurahan maupun padukuhan. Untuk yang di padukuhan yang ada diantaranya dasa wisma, RT, Pokgiat LPMD, Kelompok

Tani Handayani, Karang Taruna, Ormas umum/agama, PKK , Yandu Balita, Yandu Lansia dan lain-lain dengan segala aktvitasnya dapat dijadikan modal sosial Padukuhan Semail.

B. Profil Padukuhan Ngieng-Ireng Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

1. Orientasi dan Batas Wilayah

Padukuhan Ngireng-ireng terletak di Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55188 atau Jalan Parangtritis Km 7 Yogyakarta dengan luas wilayah 34,22 Ha dan jumlah penduduk 1147 orang dalam 371 KK. Padukuhan Ngireng-ireng termasuk blok selatan dari Kalurahan Panggunharjo yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kampus ISI dan Padukuhan Glondong
- Selatan : Padukuhan Cabeyan dan Padukuhan Bangi (Kalurahan Timbulharjo)
- Barat : Padukuhan Geneng
- Timur : Jalan Parangtritis dan Padukuhan Cabeyan

Padukuhan Ngireng-ireng terdiri dari 6 Kampung yang terbagi menjadi 7 RT yaitu

- Kampung Gedangan : RT 01 dan 02
- Kampung Karanggede : RT 03
- Kampung Nengahan : RT 04
- Kampung Saraban : RT 05
- Kampung Ngireng-ireng : RT 06

- Kampung Jomblang : RT 07

2. Kondisi wilayah

Padukuhan Ngireng-Ireng secara geografis adalah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 78 meter dari permukaan laut. Ada satu jalan propinsi yang melewati Padukuhan Ngireng-Ireng yaitu Jalan Parangtritis dan Padukuhan Ngireng-Ireng terletak tepat di Jalan Parangtritis Km 7. Luas wilayah Padukuhan Ngireng-Ireng adalah 34,22 Ha dengan luas permukiman 13 Ha,tegal pekarangan 12 Ha dan luas sawah petanian 9,22 Ha.

3. Orbitasi

Jarak Padukuhan Ngireng-Ireng ke :

- Kantor Kalurahan Panggunharjo : 2 Km
- Ibu Kota Kapanewon Sewon : 1 Km
- Ibu Kota Kabupaten Bantul : 4 Km
- Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta : 9 Km

4. Data Demografi

Padukuhan Ngireng-Ireng memiliki data kependudukan yang unik karena memiliki jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuannya. Berikut ini data Demografi sederhana Padukuhan Ngireng-Ireng :

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rukun Tetangga (RT)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	61	47	108
2	58	56	114
3	19	25	44
4	126	131	257
5	128	124	252
6	70	73	143
7	118	111	229
Jumlah	580	567	1147

Sumber : Data Padukuhan Ngireng-Ireng, Juni 2021

Jumlah Penduduk :

Laki-laki : 580 orang (51%)

Perempuan : 567 orang (49%)

Jumlah : 1.147 orang dari 371 KK

Berdasarkan Tabel 4, jumlah penduduk laki-laki di Padukuhan Ngireng ireng sebesar 51%, lebih besar daripada penduduk perempuan yang berjumlah 49%. Berada di kawasan pinggiran kota, jumlah penduduk bisa menjadi modal dasar pembangunan sebagai sumberdaya manusia yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis mata pencahariannya.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak/ belum sekolah	481	42%
2.	SD	237	21%
3.	SMP	189	16%
4.	SMA	173	15%
5.	Perguruan Tinggi	67	6%
	Jumlah	1.147	100%

Sumber : Data Padukuhan Ngireng-Ireng, Juni 2021

Berdasarkan Tabel 5, sebagai sebuah padukuhan, tingkat pendidikan penduduk Padukuhan Ngireng-Ireng relatif tinggi, karena mulai dari lulusan SD hingga perguruan tinggi jika dijumlah ada 58%. Hanya saja bila ditinjau dari wajib belajar 12 tahun hanya 21% penduduk. Hal ini bisa menjadi salah satu modal sumber daya manusia dalam membangun padukuhan khususnya dan desa pada umumnya. Penduduk yang lulus hingga perguruan tinggi diharapkan bisa meningkat karena Padukuhan Ngireng-Ireng berbatasan langsung dengan perguruan tinggi negeri yaitu ISI Yogyakarta.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	240	33%
2.	Buruh	177	25%
3.	Pedagang	45	6%
4.	PNS	41	6%
5.	Karyawan swasta	67	9%
6.	Industri rumah tangga	5	1%
7.	Lain-lain	144	20%
	Jumlah	719	100%

Sumber : Data Padukuhan Ngireng-Ireng, Juni 2021

Berdasarkan Tabel 6, penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani relatif lebih banyak yaitu sebesar 33% .Setelah itu penduduk yang bekerja sebagai buruh ada sebesar 25%. Penduduk yang bekerja sebagai pedagang relatif kecil yakni hanya sebesar 6 %, bahkan yang bergerak di bidang industri rumah tangga hanya sejumlah 5 orang (1 %)

5. Potensi Padukuhan Ngireng-Ireng

Potensi padukuhan merupakan kekuatan yang dimiliki padukuhan dapat berupa SDA, SDM, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya dan sumber daya politik yang memungkinkan dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan. Padukuhan Ngireng-Ireng memiliki banyak potensi yang

dapat dikembangkan, baik potensi fisik maupun non fisik. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Padukuhan Ngireng-Ireng. Potensi-potensi yang ada di Padukuhan Ngireng-Ireng antara lain berupa potensi alam, potensi ekonomi, potensi sosial budaya dan potensi kelembagaan.

a. Potensi Alam

Merupakan potensi fisik dasar yang dimiliki Padukuhan Ngireng-Ireng, yaitu Kondisi tanah yang subur. Tanah yang subur di Padukuhan Ngireng-Ireng digunakan sebagai lahan pertanian, namun dari tahun ke tahun jumlah arealnya semakin berkurang karena terdesak untuk pemukiman bahkan ada lahan yang dianggurkan karena telah terjadi pembebasan sejak tahun 1997 seluas 5 Ha oleh AKPRIND untuk dibangun kampus tetapi sampai hari ini belum dibangun. Padahal lahan ini lahan pertanian yang subur.

b. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi merupakan potensi yang dimiliki penduduk padukuhan dari hasil sektor mata pencaharian. Potensi ekonomi yang ada di Padukuhan Ngireng-Ireng dapat terlihat dari bermacam-macamnya mata pencaharian warganya. Diantaranya adalah pekerja bangunan, pertanian, kerajinan tangan rumahan (UMKM) seperti rajutan tas dan sepatu, dan yang paling menonjol adalah dagang ratengan/warung makan. Padukuhan Ngireng-Ireng terkenal sebagai kampung kuliner yaitu “Sego Gudeg Pawon “Mbok Marto” “ walaupun juga terkenal dengan sebutan Sego Gudeg Geneng karena memang dulu yang berjualan Sego Gudeg dengan di gendong sampai alun-alun utara Keraton Jogja selain warga Ngireng-

Ireng juga warga Geneng. Untuk hasil kegiatan pertanian sebagian besar digunakan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan masyarakat Padukuhan Ngireng-Ireng.

c. Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya yang terdapat di Padukuhan Ngireng-Ireng yaitu peninggalan-peninggalan sejarah berupa Yoni Ganesha yang berada di Kampung Karanggede RT 03 yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata budaya pertanian karena bentuk Yoninya seperti penampung air untuk membersihkan diri sebelum maupun sesudah orang ke sawah. Wisata budaya pertanian bisa mulai dari persiapan lahan, pengolahan lahan secara tradisional, penanaman sampai dengan panen (budaya wiwitan). Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan desa apabila desa mau mengelolanya melalui lembaga desa budaya.

d. Potensi Kelembagaan

Tersalurnya aspirasi dan potensi berorganisasi warga masyarakat di Padukuhan Ngireng-Ireng melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) baik lembaga-lembaga ini berada tingkat desa maupun padukuhan. Untuk yang di padukuhan yang ada diantaranya dasa wisma, RT, Pokglat LPMD, Karang Taruna, Ormas umum/agama, PKK, BKR, BKB, BKL, PIK-R "FRESH", Yandu Balita, Yandu Lansia, Lembaga Simpan Pinjam "Ngudi Rukun" dan lain-lain dengan segala aktvitasnya dapat dijadikan modal sosial Padukuhan Ngireng-Ireng.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Afabeta, Bandung.
- Ahmad, Z., & Wibowo, R.. 2021. Dampak Kebijakan Kartu Tani terhadap Produksi dan Efisiensi Usaha Tani Padi Di Kabupaten Jember. *PANGAN*, 30, 107–116. <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/540/439>. Diunduh tanggal 24 Februari 2022.
- Arikunto, S. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Bina Aksara, Jakarta.
- Chakim, L., Ririn, A., & Sanim, B. 2019. Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektifitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. *Pangan*, 28, 171–182. <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/444>. Diunduh tanggal 24 Februari 2022.
- Dahiri. 2018. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). *Buletin APBN*, 3 (14): 3–8. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-63.pdf>. Diunduh tanggal 24 Februari 2022.
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. 2020. Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Ekonomi Dan Pembangunan*, 28, 131–144. <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/198>. Diunduh tanggal 26 Februari 2022.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Jorgi, R. S., Gayatri, S., & Dalmiyatun, T. 2019. Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. *Agribusiness and Rural Development Research*, 5. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ag/article/view/4732>. Diunduh tanggal 26 Februari 2022.
- Meutia, I. F. 2017. Analisis Kebijakan Publik (M. Nizar (Ed.)). CV. Anugrah

- Utama Raharja, Lampung.
- Moleong, L. j. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moleong, L. j. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mulyana, D. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mutiara Latifa Ashari, & Hariani, D. 2019. Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. *Public Policy And Management, Review*, 8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23711>. Diunduh tanggal 24 Februari 2022.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Pnelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Kencana, Jakarta.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.15/M-DAG/PER/4/2013.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 01 TAHUN 2020 Ed.Pdf, 2020:13.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 47/Permentan/SR.310/11/2018.
- Purwanto, & Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rhodes, R. 1996. *Understanding Governance: Policy Network Governance reflexivity and Accountability*. Open University Press, New Jersey.
- Shanin, Teodor. 1966. Dalam Teode Shanin (ed), *Peasantry as a Political Factor*, Middlesex : Penguin Books, 1971
- Solichin, A. W. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan. Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*.

Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyanto. 2021. *Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial*. The Jurnal Publishing (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Indeks, Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. CV Alfabeta, Bandung.

Wahid, A. abdurrahman, Gayatri, S., & Prayoga, K. 2020. Probelmatika Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Ekonomi, Pertanian Dan Agribisnis*, 5, 691–705. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/issue/archive>. Diunduh tanggal 24 Februari 2022.